BAB II
PENGANGKATAN PRESIDEN
DI INDONESIA

A. Pengangkatan Presiden Menurut UUD 1945

Presiden adalah kepala negara, hal ini dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara. Yang menyangkut kekuasaan dan wewenang MPR. Dalam penjelasan itu idtegaskan bahwa MPR mengangkat presiden dan wakil presiden (Batang Tubuh UUD 1945).

Menurut Pasal 6 ayat 2 presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara terbanyak (Wirjono Projodikoro, 1985 : 63). Maka tidaklah ada pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat seluruhnya.

Pemilihan tidak langsung ini sekiranya dengan alasan, bahwa oleh karena MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat seluruhnya. Maka seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR itu secara tidak langsung juga dapat dinamakan kedaulatan rakyat seluruhnya.

Calon presiden diusulkan oleh fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan MPR melaui pemimpin-pemimpin fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan calon yang bersangkutan. Selanjutnya pemimpin MPR mengumumkan nama-nama calon presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada rapat paripurna MPR (Maskuri Machab, 1983 : 7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyampaian usul tersebut pada pasal 9 ketetapan ini, sudah diterima oleh pimpinan fraksi-fraksi yang lain selambat-lambatnya 24 jam sebelum rapat paripurna pemilihan presiden dibuka pimpinan majelis meneliti persyaratan calon presiden. Seorang calon presiden yang telah diusulkan kepada pimpinan majelis dan telah diumumkan pencalonannya dapat ditarik kembali oleh calon yang bersangkutan dengan mengajukan secara tertuis kepada pimpinan mejelis melalui fraksi-fraksi pengusul atau oleh fraksi yang mengusulkannya.

Apabila calon yang diajukan oleh fraksi-fraksi lebih satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia. Tetapi jika hanya seorang saja maka calon tersebut disahkan oleh rapat paripurna majelis menjadi presiden.

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota majelis yang hadir.

Dalam hal perhitungan suara ternyata tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap dua calon yang mendapat suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

Apabila dari hasil penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang hadir, maka putusan diambil berdasarkan jumlah suara yang terbanyak diantara dua calon tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila masing-masing calon mendapat jumlah suara sama banyaknya, maka pemungutan suara dilakukan berdasarkan kehadiran wakil-wakil dari fraksi yang membawakan jumlah suara dari fraksi masing-masing secara tertulis. Dan jika hasil masing-masing penghitugan suara yang dilakukan masih ternyata masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka fraksi-fraksi mengusulkan calon presiden yang lain (C.S.T. Kansil, 1986 : 425-427).

Sebelum memangku jabatannya presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama (UUD 1945 Pasal 9). Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1973 hanya dinyatakan bahwa sumpah atau janji presiden dan wakil presiden hanya diucapkan di depan MPR saja (Mashuri Maschab, 1983 : 7).

Dalam hal presiden meninggal, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan atau berdasarkan ketetapan MPR disebut sebagai "berhalangan tetap", sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Sebelum memegang jabatan presiden, ia bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut tidak mungkin mengadakan rapat, wakil presiden sebelum memegang jabatan presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung sesuai dengan Tap. MPR No. VII/MPR/1973. Pasal 2 (Sri Soemantri, 1985 : 266).

Dari kaedah tersebut dapat diketahui bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ada tiga macam peristiwa yang dapat menjadi dasar pergantian presiden, yaitu mangkat, berhenti dan tidak dapat melakukan kewajiaban.
2. Ketiga macam peristiwa tersebut terjadi dalam masa jabatan presiden, suatu kondisi yang sebenarnya tidak perlu disebutkan karena kalau terjadi "di luar' masa jabatan presiden, maka persoalannya menjadi tidak relevan lagi.
3. Yang menggantikan presiden ialah wakil presiden.
4. Lamanya masa pergantian ialah sisa masa jabatan presiden dan yang digantikan oleh wakil presiden (Ahmad Bahar, 1997 : 155-156).

Apa yang diuraikan di atas adalah mengenai pergantian presiden oleh wakil presiden jika jabatan lowong, sampai presiden dipilih kembali melalui pemilihan umum.

B. Pengangkatan Pengganti Presiden di Indonesia

1. Pengangkatan Pengganti Presiden dari Soekarno ke Soeharto.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Proklamasi itu ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno dan Hatta, di jalan Pegangsaan No. 56 Jakarta.

Sejak hari proklamasi kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia merupkan sejarah suatu bangsa yang masih muda dalam menyusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, politik dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah konstitusi dan ideologi yang mereka ciptakan sendiri sesuai perkembangan budaya masyarakat (Inu Kencana Syafiie, 1997 : 105).

Rapat besar panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi 17Agustus 1945, selain berhasil menetapkan Undang-undang Dasar 1945 menjadi konstitusi Republik Indonesia Proklamasi 1945 dengan aklamasi memilih dua tokoh proklamator, Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pertama, berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan Undang-undang dasar 1945 (J.K. Tuma Kaka, 1998 : 7).

Presiden Soekarno tidak hanya menjalankan tugas kewajibannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Republik Indonesia, tetapi juga pemimpin perjuangan dan meneruskan perjuangan rakyat Indonesia bersama para pahlawan tanah air dan perjuangan rakyat Indonesia bersama gerakan-gerakan nasional terdahulu, melawan imperialisme Belanda yang mencoba kembali menjajah rakyat Indonesia sesudah membonceng sekutu dalam perang dunia kedua.

Sementara ini Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu yang akan melucuti bala tentara Jepang. Pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno memutuskan memindahkan pusat pemeritahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta (Ensiklopedi Nasional, 1991 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

315). Pada tanggal 19 Desember 1948 ibu kota Yogyakarta menjadi sasaran utama serangan serdadu Belanda, dalam keadaan negara menghadapi kesulitan seperti itu tiba-tiba persatuan bangsa dirobek-robek oleh pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948.

Pada tanggal 19 Desember 1948 itu juga menjelang sore Yogyakarta jatuh ke tangan musuh, tetapi sebelumnya pukul 10.00 pagi, sidang kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memutuskan untuk memberi mandat kepada Drs. Moh. Syafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI), dan apabila juga tidak sempat, juga dapat dibentuk PDRI di Indonesia. Selanjutnya Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta ditawan oleh Belanda (Inu Kencana Syafiie, 1997 : 107-108). Dengan terbntuknya pemerintahan itu, eksistensi Republik Indonesia terjaga. Pemerintahan darurat menjalankan fungsinya sampai dicapai kesepakatan Roem Van Royen yang antara lain berisi jaminan Belanda untuk membebaskan Soekarno-Hatta dan memulihkan ibu kota Jakarta.

Selanjutnya Indoensia dan Belanda mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang menetapkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam perkembangannya RIS tidak dapat memenuhi kehendak rakyat sehingga kemudian diubah menjadi negara Kesatuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia (15 Agustus 1950) dengan Soekarno tetap menjabat presiden (Ensiklopedi Nasional, 1991 : 316).

Hal ini menyadari bahwa tidak mungkin lagi mendirikan pemerintahan sebagaimana jaman Hindia Belanda dulu, oleh karena itu diusahakan jalan lain, yaitu mendirikan sebuah negara berbentuk federal. Sedangkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, oleh Belanda hanya dinggap sebagai salah satu negara bagian saja dalam negara Republik Indonesia sementara tersebut. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah konstitusi RIS sedangkan sistem pemerintahannya menggunakan kebinet parlementer.

Memperhatikan keadaan negara-negara bagian yang semakin sukar untuk diperintah, sedangkan kewajiban pemerintah negara federal semakin berkurang selama penyelenggaraan konstitusi RIS, apalagi didukung pernyataan bahwa Indonesia terdiri berbagai suku, adat istiadat, agama, pulau-pulau, bahasa daerah, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun konstitusinya adalah UUDS tahun 1950. Oleh karenanya sistem pemerintahan tetap dalam bentuk parlementer, yaitu para menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan parlemen (DPR) dapat menjatuhkan kebinet melalui mosi tidak percaya (Inu Kencana Syafiie, 1997 : 110).

Sejak hari pengumuman piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, konstitusi RIS tidak berlaku lagi. Dan mulai waktu itu berlakulah UUDS Republik Indonesia 1950 (J.K. Tuma Kaka, 1998 : 9). Sementara itu, Dewan Konstituante, yang merupakan produk demokrasi liberal, lebih banyak menjadi ajang perdebatan yang berlarut-larut dan tidak berhasil memenuhi tugasnya menyusun Undang-undang Dasar. Kegagalan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959. Dengan dekrit ini konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 dalam rangka Demokrasi terpimpin.

Dalam prakteknya, Demokrasi terpimpin itu menyimpang dari UUD 1945. Menurut UUD 1945 presiden adalah mandataris MPR, sedangkan dalam praktek demokrasi terpimpin MPRS secara tidak langsung dikendalikan presiden. Partai-partai politik dan tokoh-tokoh masyarakatpun mulai mengkultuskan Soekarno sehingga akhirnya MPRS mengangkat bung Karno sebagai presiden seumur hidup (Ensiklopedi Nasional, 1991 : 317). Pengkultusan tersebut diperkuat dengan ketetapan MPRS Republik Indonesia No. III/MPRS/, tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia bung Karno menjadi presiden seumur hidup, ditinjau kembali oleh ketetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MPRS Republik Indonesia No. XVIII/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 (Sri Soemantri, 1985 : 60).

Dengan mulai berlakunya demokrasi terpimpin terjadilah satu perubahan dalam sistem politik Indonesia. Dalam kacamata dunia Barat Indonesia telah jatuh ke sistem kekuasaan otoriter. Semua kekuasaan beralih dalam satu tangan yaitu Soekarno meskipun disini tercatat lembaga-lembaga seperti DPR, MPRS tetapi dengan dibentuknya Dewan Nasional praktis kekuasaan berada di tangan Soekarno. Sejak saat itulah semua lembaga politik seperti DPR, MPRS, Dewan Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung bekerja di bawah komando Soekarno (Nazaruddin Ajamsuddin, 1993 : 80-81).

Tidaklah mengherankan kalau sebagian besar kekuatan-kekuatan dalam masyarakat mendukung gagasannya termasuk didalamnya kaum militer. Disamping kegagalan kepartaian dan bergolaknya kekacauan daerah yang menyebabkan instabilitas tinggi dan pada akhirnya mendorong terwujudnya demokrasi terpimpin, ternyata faktor kharisma Soekarno agaknya tidak dapat kita abaikan begitu saja.

Sistem demokrasi terpimpin yang dikepalai almarhum Presiden Soekarno yang pada mulanya bertujuan antara lain menghilangkan pertentangan-pertentangan politik yang semakin menajam di dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dari uraian-uranian di atas gejala-gejala pertentangan politik yang semakin menajam di bawah demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpimpin sudah tampak semenjak masyarakat Indonesia menginjakkan kaki mereka ke dalam sistem politik baru ini. Pola tingkah laku politik yang berlaku di bawah sistem politik ini sangat diwaarnai oleh berkembangnya sikap bermusuhan antara kekuatan-kekuatan politik yang berlawanan kepentingannya, terutama PKI dan Militer. Konsekwensinya terjadilah kegiatan-kegiatan politik yang saling mengintai, saling curiga-mencurigai, saling jaga-menjaga, saling hambat-menghambat, yang semunaya menjurus kepada sebuah suasana politik yang jauh dari stabil. Di tahun 1960 pada akhirnya sistem demokrasi terpimpin ambruk dengan sendirinya (Alfian, 1992 : 46).

Kehancuran demokrasi terpimpin terjadi setelah kudeta yang gagal lewat gerakan 30 SebagaiPKI tahuun 1965 berpegang kepada selembar surat perintah tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar), Jendral Soeharto, pemegang mandat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara. Ada beberapa versi tentang peristiwa G 30 S/PKI diantaranya ialah :

Pertama, gerakan ini sebuah usaha kudeta oleh PKI di bawah kepemimpinan Aidit dan disokong para perwira yang bersimpati kepadanya. Pendapat ini dianut oleh seluruh golongan anti komunis di Indonesia.

Kedua, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan komunis, apalagi dengan pimpinan PKI, tetapi merupakan masalah intern tentara sendiri, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha sekelompok kecil orang dalam difisi Siliwangi untuk memanfaatkan Soekarno dan PKI untuk mencapai tujuan kelompok sendiri.

Ketiga, peristiwa tersebut merupakan skenario CIA dalam konteks politik internasional ketika itu, bung Karno tidak disukai oleh AS, karena itu AS berupaya menggulingkan pemerintahan Soekarno dengan segala cara.

Keempat, perwira AD yang bersimpati kepada komunis kecil kemungkinannya melakukan tidandakan dratis melawan kepemimpinan AD tanpa adanya persetujuan Presiden Soekarno. Menurut versi ini, G 30 S/PKI merupkan konsekwensi rivalitas Soekarno dan AD.

Kelima, peristiwa G 30 S/PKI adalah sekenario Angkatan Darat sendiri. Ada yang mengorganisir pelaksanaan kudeta, sebenarnya adalah agen AD yang disusupkan ke dalam tubuh PKI, bukan agen PKI yang bekerja di Angkatan Darat (Abdul Azis Thaba, 1996 : 182).

Apa yang sekarang dikenal dengan peristiwa 30 September 1965 dengan cepat telah mengubah warna dan bentuk kehidupan politik Indonesia. Peristiwa ituu telah menyebabkan berakhirnya riwayat dua kekuatan politik utama, Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya memainkan peranan sangat penting, disamping militer (ABRI, terutama TNI Angkatan Darat), dalam sistem politik Indonesia (Alfian, 1992 : 29). Dalam bulan Maret 1968 Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara secara resmi menjadikan Jendral Soeharto presiden penuh yang kedua, dan ini sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti bahwa struktur kekuasaan baru yang diberi nama orde baru sudah menjadi semakin mantap posisinya menggantikan rezim Soekarno yang diberi julukan orde lama.

Penyerahan kekuasaan pemerintah negara oleh presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto oleh MPRS dianggap bahwa presiden Soekarno sudah berhenti sebagaimana dinyatakan UUD 1945 Pasal 8.

Tanggal 20 Juni 1966 Sidang Umum MPRS ke-empat tahun 1966 dibuka. Sidang Umum ini berlangsung sampai tanggal 6 Juli 1966. MPRS yang bersidang umum ke-empat ini sudah bukan lagi MPRS tahun 1959 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan PMRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR dengan ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, Sidang Umum MPRS ke-empat tahun 1966 ini, menghasilkan beberapa ketetapan yang kita anggap prinsipal dan fundamental. Misalnya ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar. Dengan ketetapan in Supersemar ditingkatkan dari surat perintah presiden/Panglima tertinggi ABRI/PBR/mandataris MPRS, menjadi ketetapan MPRS.

Meningkatnya Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945), dan sebagai presiden yang menjalankan segala kekuasaan MPR sebelum MPR dibentuk menurut aturan Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar 1945 (Pasal IV aturan peralihan UUD 1945), menjadi ketetapan MPRS, agak janggal kedengarannya. Sebab penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS, tidak mengatur tugas mengeluarkan surat perintah seperti Supersemar itu (J.K. Tumakaka, 1998 : 29-30).

Untuk selanjutnya ketetapan MPR Sementara RI No. X/MPRS/1966 tentang surat perintah presiden/Panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi/mandataris Majelis Pemusyawaran Rakyat Sementara Republik Indonesia, "dinyatakan tidak berlaku" karena sudah tertampung dalam ketetapan MPR RI No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan kewenangan kepala presiden/mandataris MPR untuk melaksanakan tugas pembangunan ketetapan MPR RI No. X/MPR/1973 hanya berlaku satu kali saja (Sri Soemantri, 1985 : 63).

Penafsiran Supersemar sendiri berbeda-beda apakah Supersemar hanya merupakan instruksi kepada Jendral Soeharto untuk melaksanakan tugas memulihkan keamanan, stabilitas negara dan menjaga kewibawaan Soekarno ataukah ia merupakan pelimpahan wewenang dari Soekarno kepada Soeharto, ironisnya naskah Supersemar yang asli sampai sekarang belum diketemukan sehingga menimbulkan pergunjingan (Marwati P. dan Nugroho N, 1984 : 406).

Pada awal Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS selama lima hari, yang dipimpin Jendral Nasution menerima laporan resmi dari komite

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan MPRS mengenai peranan Soekarno dalam peristiwa Gestapu. Dengan suara bulat, Soekarno dilepaskan dari semua kekuasannya, dan Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden. Kemudian, ketika keterlibatan Soekarno dalam peristiwa Gestapu kelihatan melalui kesaksian (para terpidana) di depan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), ia diperbolehkan tinggal di Bogor dalam tahan rumah. Selanjutnya sampai meninggalnya di tahun 1976 pada usia 69 tahuun, hidupnya ditempat penyucian tidak dapat diketahui dengan jelas, kecuali bahwa ia tinggal berasama seorang istrinya, Hartini yang dulu berkumpul bersamanya (Marshall Green, 1995 : 99-100).

2. Pangangkatan Pengganti Presiden dari Soeharto ke Habibie

Persoalan pertama yang menghadang rezim baru adalah warisan krisis dari rezim sebelumnya. Ada dua macam krisis yaitu : di bidang ekonomi, terjadi kemorosotan stagnasi, sementara itu di bidang politik, terjadi ketidakstabilan karena pertentangan antara kelompok dan politik dalam masyarakat.

Para pendukung Orde Baru sepakat untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi, pilihan ini tepat untuk mengantisipasi gejolak masyarakat yang sekian lama hidup melarat dan menyimpang harapan baru dengan datangnya Orde Baru. Dengan strategi pembangunan yang berorientasi keluar, maka modal-modal dari luar negeri mulai mengalir, pertama dari Amerika dan Jepang. Di lain pihak, para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha dalam negeri yang kebanyakan golongan non pri memperoleh kesempatan yang baik karena merekalah yang memiliki modal untuk mengembangkan usaha. Sedangkan pada pembangunan politik sasaran utamanya adalah pendekatan keamanan (*scurity approach*), bukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) (Abd Aziz Thaba, 1996 : 186, 203). Untuk itu, dilakukan pembagian tugas. Pihak militer menjalankan pendekatan keamanan, sedangkan tekhnokrat menerapkan pembangunan ekonomi.

Dalam waktu lima tahun sejak 1968, terciptalah sebuah format politik baru di bawah Soeharto yang sekaligus menunjukkan sebuah citra sukses yang dicapainya di bidang politik yang kiranya sulit untuk diperdebatkan. Kunci pertama dari format baru ini terletak pada pemantapan posisi dwi fungsi ABRI di dalam sistem politik Indonesia, seiring dengan itu sebuah proses penyederhanaan sistem kepartaian berlangsung dengan lancar dan sistematis (Alfian, 1992 : 56).

Hasil-hasil, pembangunan telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia kini diakui sebagai salah satu negara dunia III yang dapat melaksanakan pembangunan ekonomi yang cukup meyakinkan, karena kemampuan Indonesia dalam menjaga tingkat pertumbuhan di atas rata-rata lima persen pertahun sesuai dengan rencana. Tingkat kehidupan masyarakat sudah jauh berbeda, misalnya tingkat kehidupan membaik, transportasi lancar, barang-barang kebutuhan pokok selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (M. Rusli, 1992 : 39).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bidang politik, hasil pembangunan ditunjukkan oleh terciptanya dan terpeliharanya stabilitas nasional, kuat dan efektifnya pemerintah dan terselenggaranya pemilu secara teratur. Dalam kehidupan sosial, kesimpulan itu didukung oleh kenyataan tentang peningkatan kompleksitas kehidupan masyarakat, seperti ditunjukkkan oleh maraknya organisasi, kedudayaan dan kehidupan agama. Akan tetapi kelemahan pembanguan dibuktikan oleh para kritisi dengan menunjuk kepada berbagai bentuk kesenjangan. Kesenjangan kekuasaan diantara lapisan konglomerat yang mempunyia kekayaan sampai triliun rupiah berdampingan dengan golongan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara kehidupan politik mengalami perkembangan yang amat terbatas (Arbi Sanit, 1998 : 293).

Persoalan lain adalah kekuasaan yang begitu besar menjurus kepada sebuah sistem yang monopolitik dimana melalui proses selanjutnya kekuasana itu mungkin saja dimonopoli dan terpusat di tangan satu kekuatan politik militer (Al-Fian, 1992 : 57).

Selama tiga puluh tahun Orde Baru nyaris tidak terkoreksi dan terkontrol secara politik. Pemilu-pemilu menghasilkan DPR maupun MPR. Tetapi secara instritusional DPR dan MPR tidak pernah berani mengoreksi pengelolaan politik dan ekonomi oleh pemerintah yang dewasa ini terperangkat ke dalam sejumlah soal besar : Korupsi, monopoli dan kolusi, soal-soal monopoli, kolusi dan inefisiensi ekonomi cenderung di atas pemerintah sekedar melalui pernyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apologis, slogan dan jorgan ketimbang agenda aksi yang bisa menyelamatkan bangsa memasuki era globalisasi yang amat kompetitif yang sudah di depan mata (Syamsudin Haris, 1998 : 333).

Ciri-ciri bangsa Indonesia dalam perjalanan kehidupan bangsa selama sepuluh sampai lima belas tahun terakhir ini pertama, walaupun ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, kemiskinan dan kemunduran masih tetap merupakan fenomena yang tidak mudah dipecahkan.

Kedua, korupsi tetap meraja lela dan bahkan cenderung makin gawat dari tahun ke tahun. Sejauh ini usaha-usaha untuk memberantas korupsi tidak berhasil, bahkan terlihat adanya pendekatan-pendekatan domistik yang tidak menyentuh masalah itu.

Ketiga, proses demokratisasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sampai pada batas yang cukup jauh demokrasi Indonesia cukup banyak berkaitan dengan format dan belum merefleksikan substansi demokrasi itu sendiri (Amin Rais, 1998 : 12).

Krisis moneter yang melanda negara Indonesia sejak bulan Juni 1997 yang dimulai dengan tukar rupaih terhadap dolar Amerika Serikat melorot lebih dua kali lipat sudah menjelma menjadi krisis ekonomi yang berkepangangan atau, paling tidak sudah diambang dua digit dan tingkat pengangguran sudah berlipat ganda dibandingkan sebelum tahun 1995 (Faisal H. Basri, 1998 : 222). Hal tersebut menjadikan kata reformasi dan suksesi (sebagai isu nasional) merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu keharusan sejarah demi kelestarian Republik Indonesia (A. Dahlan Ranowiharjo, 1998 : 22).

Seiring dengan itu meledaklah bencana sosial di beberapa daerah, antara lain : Ujung Pandang, Banjar Masin, Pekalongan, Sitobondo, Tasik Malaya dan beberapa kota lainnya. Unjuk rasa keprihatinan pemuda dan mahasiswapun mulai marah dipenghujung tahun 1997. Pada tingkat permulaan ini tuntutan unjuk rasa para pemuda dan mahasiswa masih terbatas pada tuntutan reformasi pengadaan sembako dan pendistribusian sembako secara lancar dan adil dengan harga terjangkau oleh rakyat kecil (J.K. Tumaka, 1998 : 107).

Dengan melihat persoalan seperti uraian di atas, agaknya menjadi jelas bahwa bangsa Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional baru. Dengan kata lain, harus ada suksesi pada pemilu 1998 yang akan datang (Amin Rais, 1998 : 28). Bagiamanpun suksesi tidak dapat dialokasikan sebagai agenda politik semata-mata suksesi tidak hanya tergantung pada ada atau tidaknya calon pengganti Presiden Soeharto. Suksesi mau tidak mau akan menjadi agenda massa, terlebih-lebih dalam keadaan massa politik Orde Baru yang terlihat semakin cerdas dan berani seperti sekarang ini (Eep Saefullah Fattah, 1998 : 251).

Pada 5 Maret 1998, reformasi mulai ditunjukkan bentuknya dalam konsep. Sejumlah dua puluh mahasiswa yang berasal dari wakil-wakil mahasiswa Universitas Indonesia menyampaikan konsep tersebut kepada fraksi ABRI MPR. Isinya menyangkut upaya melakukan reformasi politik dan ekonomi di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka menolak pertanggungjawaban presiden di MPR (S. Sinansari Ecip, 1998 : 35).

Pada 10 Maret 1998, terpilihlah Soeharto sebagai Presiden lagi untuk yang ketujuh kalinya. Tanggal 14 Maret, susunan Kabinet Pembangunan VII diumumkan. Banyak muncul wajah-wajah baru, tapi mengecewakan harapan masyarakat karena hubungan nepotisme cukup menonjol.

Terpilihnya Soeharto menjadi Presiden untuk ke tujuh kalinya membuat aksi mahasiswa kian marak dan mulai terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Tanggal 2 Mei terjadi lagi aksi mahasiswa yang melibatkan puluhan perguruan tinggi dan ribuan mahasiswa. Insiden berdarah terjadi di IKIP Jakarta. Tanggal 12 Mei lima mahasiswa Tri sakti tewas diterjang peluru, hari berikutnya kerusuahan massa tak terhindarkan baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya terjadi pembakaran, perusakan dan penjarahan toko (JK. Tumakaka, 1998 : 112).

Tanggal 18 Mei pukul 09.00 WIB, ratusan mahasiswa mendatangi gedung MPR/DPR Senayan. Mereka menemui para anggota fraksi di DPR. Pukul 14.00 WIB, pimpinan MPR.DPR mengadakan rapat pleno. Selanjutnya mereka memanggil satu persatu pimpinan fraksi DPR untuk melaporkan aspirasinya mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat yang mengadu kepada mereka, semua fraksi melaporkan bahwa aspirasi yang masuk semuanya menuntut Bapak Soeharto mundur (Forum, 15 Juni 1998 : 23).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggal 19 Mei, di istana negara Pak Harto berkonsultasi dengan sembilan tokoh ulama dan cendikiawan, dari hasil pertemuan tersebut pak Harto memutuskan untuk membentuk komite reformasi, *mereshuffle* kabinet, dan melakukan pemilu secepatnya berdasarkan UU Pemilu yang baru. Ia juga menegaskan tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai Presiden (Forum, 15 Juni 1998 : 23).

Pada 20 Mei pukul 14.30 sebanyak 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin mengadakan rapat di Bappenas. Empat belas menteri tersebut menyatakan tidak bersedia menjadi menteri lagi dalam kabinet yang akan diresuffle. Di alenia pertama surat, mereka agak mendesak kehendak agar Presiden mundur. Tak pelak surat tersebut memang memukul telak presiden. Dengan itu pula dapat diduga, presiden mempertimbangkan untuk memutuskan berhenti jadi presiden.

Seperti diketahui, setelah pertemuan dengan kalangan agama dan tokoh masyarakat di istana, akan dibetuk komite reformasi. Mereka yang hadir lebih dulu menyatakan untuk tidak ikut di komite maupun di kabinet (S. Sinansari Ecip, 1998 : 123, 128).

Maka tanggal 21 Mei 1998, riwayat nusantara memasuki paragraf baru, presiden Republik Indonesia Jendral Besar (Purn) Soeharto menyatakan berhenti, ia menyerahkan jabatan yang dipegangnya selama lebih dari dua pertiga usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan ini kepada Prof. Ing. Bacharuddi Jusuf Habibie, yang baru menjabat sebagai wakil presiden selama 72 hari.

Prosesi penyerahan jataban itu berlangsung singkat dan sederhana. Bertempat di Istana Merdeka acara itu dihadiri sejumlah menteri dan pejabat pimpinan MPR/DPR, ketua Mahakamah Agung (MA), serta tidak lupa wartawan domistik dan asing (Forum, 15 Juni 1998 : 10).

Habibie menjadi presiden melalui peraturan yang lebih tinggi dari ketetapan, yaitu melalui Pasal 8 UUD 1945 dan Tap No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan disebutkan dengan tegas "……menugaskan Prof. DR. Ing. Bachruddin Jusuf Habibie sebagai presiden Republik Indonesia ……" (Forum, 28 Desember 1998 : 45).

B.J. Habibie menjadi presiden Republik Indonesia sesudah beliau, akan datang lagi presiden Republik Indonesia ke-empat, ke-lima, ke-enam dan seterusnya. Rakyat mendo'akan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa menganugrahkan kebijaksanaan dan kemampuan kepada presiden Republik Indonesia sekarang maupun akan datang, untuk dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dan dapat mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id